

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun, 2015, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.

Black, Henry Campbell, 2009, *Black's Law Dictionary*, 9th ed., West Publishing Co., Minnesota.

Budiono, Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, 2013, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiono, Herlien, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Ketiga*, 2015, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2014, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Ginting, Darwin, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Gunanegara, 2008, *Rakyat & Negara, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Tata Nusa, Jakarta.

Hadjon M. Phillipus, et al, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to The Indonesian Administrative Law*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Handoko, Widhi, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta

Hartanto J. Andy, 2014, *Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta.

- Limbong, Bernhard, 2014, *Politik Pertanahan*, Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Manan, H. Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 2005, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, 2014, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Pelita Harapan, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, 2006, Tangerang.
- Santoso, Urip, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- , 2014, *Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- , 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sihombing, Irene Eka, 2009, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Soediki, Achmad, 2012, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemardjono, Maria S.W., 2009, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, KOMPAS, Jakarta.
- , 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, KOMPAS, Jakarta.
- Soerodjo, Irawan, 2013, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek dan Teori*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahid, A.M.Yunus, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 Tentang Pengadilan Landreform.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal (Peraturan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saru Pintu).

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

C. Internet

Eder, J. Phanor, *Agrarian Reform in Venezuela*, The American Journal of Comparative Law, Vol. 9 No.4., Autumn, 1960, diakses dari www.jstor.org.

Hadjon, Phillipus M., *Ahli Menilai Ada Kegagalan Pembuatan Hukum Dalam Undang-Undang Minerba*, diakses dari www.hukumonline.com/berita/baca/lt4682a61fb1480/ahli-menilai-ada-kegagalan-pembuatan-hukum-dalam-uu-minerba.

Irhamdany, Firly, *Analisis Yuridis Terhadap Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Hak Milik Non Pertanian Menurut Hukum Pertanahan Nasional*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, diakses dari lib.ui.ac.id/file?file=digital/20280411-T21669-Analisis%20yuridis.pdf.

Land Reform Plus, Ruang Lingkup Agraria, diakses dari <http://www.bpn.go.id/Program/Reforma-Agraria/Ruang-Lingkup>.

Mungkasa, Oswar, *Reforma Agraria, Sejarah, Konsep dan Implementasinya*, diakses dari www.academia.edu/9524718/Reforma_Agraria_Sejarah_Konsep_dan_Implementasi.

Ronald Dworkin, diakses dari <http://banyuperwitasari.blogspot.com/2013/ronald.dworkin.html>.

